

ABSTRAK

Kewajiban negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan yang adil dan layak atau *fair and equitable treatment* (FET) menurut standar perlakuan minimum (MST) berdasarkan hukum internasional terhadap penanaman modal asing (PMA) seringkali beriringan dengan kewajiban dan kepentingan nasional mereka untuk menindak dan memberantas penyuapan menurut hukum dan kebijakan nasional mereka sendiri. Hal ini terlihat pada kasus seperti *Cortec Mining v. Kenya* dan *BSGR v. Guinea*, di mana negara tuan rumah mencabut izin pertambangan dengan penanaman modal asing secara serta merta yang diduga diperoleh melalui penyuapan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pencabutan izin tersebut dapat dilakukan secara serta merta dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip FET. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan serta teknik interpretasi data secara gramatikal dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin pertambangan oleh pejabat administrasi tidak dapat dilakukan secara serta merta, tetapi wajib dilakukan berdasarkan prinsip *fair hearing* dan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap agar penyuapan terbukti secara sah. Lebih lanjut, berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada kasus *Eletronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy)* dan putusan arbitrase ICSID yang mengikutinya, pencabutan demikian merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga dikategorikan melanggar prinsip FET menurut MST. Penulis melihat adanya benturan antara hak penanam modal asing untuk mendapat perlakuan FET berdasarkan MST dengan Doktrin Calvo yang menjunjung kedaulatan dan kepentingan negara tuan rumah untuk menetapkan peraturan dan kebijakannya sendiri sepanjang tidak bersifat diskriminatif terhadap PMA dan kewajiban penanam modal asing untuk tunduk terhadap peraturan negara tuan rumah.

Kata Kunci: *Fair and Equitable Treatment*, Pencabutan Izin Pertambangan, Penanaman Modal Asing, Penyuapan

ABSTRACT

The state's obligation to provide a foreign investment fair and equitable treatment (FET) by the minimum standard of treatment (MST) in accordance with international law is often side-by-side with their national's duty and interest to punish and eradicate bribery in accordance with their law and policy. This is well-portrayed in Cortec Mining v. Kenya case and BSGR v. Guine case, where the host states straight away revoked a permit for mining with foreign investment due to an allegation of bribery in obtaining such permit. This research is conducted to find out whether such revocation can be conducted in arbitrary means and can be categorized as a violation of FET principle. This research uses juridical-normative approach with datas obtained through literature study technique and data interpretation through grammatical and comparative technique. This research reveals that the mining permit revocation by administrative authority shall not be conducted in arbitrary means, but by taking into account the fair hearing principle and only be conducted after a legally binding court decision provides legitimate proof of the existance of bribery. Moreover, according to International Court of Justice's Decision on the case of Elettronica Sicula S.p.A (ELSI) (United States v. Italy) and it's following ICSID arbitration award, such revocation is a form of arbitrariness and hencefore forms a violation FET by MST. The writer observe a clash between foreign investor's right of FET by MST with the Calvo Doctrine that upholds the host state's sovereignty and interest to enact their law and policy as long as not constructing a discriminative treatment towards foreign investment and the foreign investor's duty to obey the host state's law.

Keywords: *Fair and Equitable Treatment, Mining Permit Revocation, Foreign Investment, Bribery*